

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadits:

Ahmad Abu al-Rus, *Jara'im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khiyanat al-Amānah wa al Syayk Bi Dūni Rasīd (Iskandariyah: al-Maktabah al-Jami'ī al-Hadīth*, 1997.

Syamsul Anwar, dkk. *Fiqh Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*, Pusat Studi Agama dan Peradaban. Jakarta, 2006.

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jil. 2 : Dār al-Fikr, Bairut, 1983

### Buku:

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Aziz Samsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1986.

A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, Jil. 3 : Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2003.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

....., *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013.

Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif (Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*, edisi 1, cet 2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2008.

Edy, Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada. Media Group*, Jakarta, 2016.

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ghani, *Hukum Suap Dan Hadiah*, Cendikia, Jakarta, 2003
- Indryanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Indonesian Corruption Watch (ICW), edisi Revisi, *Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat*, 2015.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: normative, teoritis, praktis, dan masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton and Company, New York, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Moeheriono. “*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*”. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Manvan Effendy, *Kejaksaan (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, et.al., *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*, (alih bahasa oleh Rini Adriati), DepKumHam, Jakarta. 2009.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.
- R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Ahaen Peterhaem, Jakarta, 1989.

Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, terj., Oleh Masri Maris dengan “*Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*” : Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Undip, Semarang, 1990.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

Surachmin&Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Steven P.Lab, *Crime Prevention Approaches Practices And Evaluations Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik Dan Evaluasi*, Ptik Press , Jakarta, 2013.

Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017.

### **Jurnal :**

Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011.

Arif Setiawan, Umar Ma'ruf, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017.

**Aluysius Sutikna, Sri Kusriyah, Widayati, Kusriyah, Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018.**

Jawade Hafidz, Agung Widodo, *Pelanggaran Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Penyedia Barang Dan Jasa Atau Pengguna Jasa Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.

Selamet Agista Erikha Bhakti, Djauhari, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-135/A/JA/05/2019 Tentang Format /Format/Bentuk, Kode dan Cara Pengisian Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-014/A/JA/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 04 Tahun 2019 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Kejaksaan Agung Nomor 346 tahun 2019 pada tanggal 22 November 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4 Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-059/A/JA/03/2018 dan Instruksi Jaksa

Agung RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 345 Tahun 2019.

Frasa Menimbang huruf b Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 01 Oktober 2015.

**Internet:**

Robert B. Seidman & William J. Chambls, Law, Order, and Power, Printed in United States of America, Pubhlished Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78-111948. <http://dianauliacloud.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, diakses pada tanggal 21 November 2020

<https://www.suara.com/news/2018/02/23/165022/indonesia-jadi-negara-terkorup-nomor-96-di-Dunia> Jum'at, 23 Nopember, 2020.

[www.equator.co.id/rasa-takut-berlebihan-bikin-penyerapan-anggaran-rendah](http://www.equator.co.id/rasa-takut-berlebihan-bikin-penyerapan-anggaran-rendah) diakses tanggal 15 Nopember 2020.

[www.cnnindonesia.com/nasional/kejangung-tetap-kawal-pembangunan-meski-tp4-dibubarkan](http://www.cnnindonesia.com/nasional/kejangung-tetap-kawal-pembangunan-meski-tp4-dibubarkan) diakses Jumat tanggal 13 Nopember 2020.

<http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektivitas-menurut-para.html> diakses tanggal 13 Nopember 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan> diakses Senin 30 Nopember 2020

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, diakses pada tanggal 21 November 2020.

[https://www.kejaksaan.go.id/tentang TP4P/D](https://www.kejaksaan.go.id/tentang-TP4P/D), diakses 20 Nopember 2020.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/efektivitas-kompleksitas-bekerjanya-hukum.html>, diakses pada tanggal 21 November 2020.

<http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektivitas-menurut-para.html> diakses tanggal 13 Nopember 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan> diakses Senin 30 Nopember 2020.

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, diakses pada tanggal 21 November 2020.



<https://nkriku.com/pengertian-korupsi-dampak-korupsi-dan-cara-mengatasikorupsi/> diakses tanggal 19 November 2020.



